

**KOLABORASI ANTAR AKTOR DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA, *PILOT PROJECT* DESA WISATA (DESA HARAPAN
JAYA, KEC WAY RATAI, KABUPATEN PESAWARAN)**

(Skripsi)

Oleh :

RAHMAT SEPTIAWAN



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KOLABORASI ANTAR AKTOR DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, *PILOT PROJECT* DESA WISATA (DESA HARAPAN JAYA, KEC WAY RATAI, KABUPATEN PESAWARAN)

Oleh

Rahmat Septiawan

Pengembangan desa wisata harus mengetahui karakteristik kelebihan dan kelemahan desa tersebut sehingga dapat sesuai dengan daya tarik yang dijual, tujuan dibentuknya desa wisata adalah agar menjadikan desa yang mandiri dan menunjukkan potensi di desa dengan tujuan agar upaya program pemerintah berjalan dengan maksimal dengan diimplementasikannya kegiatan pengembangan desa wisata dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang baik bagi masyarakat setempat. Salah satu strategi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata daerah adalah melalui penggunaan kolaborasi model Panthelix. Model Panthelix diperkenalkan dan dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Deastinasi Pariwisata Berkelanjutan, Bahwa dalam menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukannya pendorong sistem kepariwisataan melalui peran 1). *Bussiness*, 2). *Government*, 3). *Community*, 4). *Academican*, 5). *Media*. (BGCAM) oleh Fosler (2002). Menurut Morse dan Stephens (2012:566), kolaborasi merupakan wujud pendukung dan pelaksanaan *governance* yang menekan kealamian proses kesepakatan dari berbagai aktor sosial (*stakeholder*) yang mana tidak hanya dari pemerintah, akan tetapi melibatkan masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam tindakan kolektif atau kerjasama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata untuk mewujudkan *pilot project* Desa Wisata, Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu : Kurang optimal dalam sebuah ketergantungan aktor yang terlibat perlu adanya pemberdayaan terutama masyarakat dan POKDARWIS dikarenakan mereka terlibat secara langsung dan berpengaruh bagi perkembangan pariwisata Desa Harapan Jaya, Kurangnya kesadaran dari pihak aktor dalam bidang pariwisata, sehingga belum optimalnya kerjasama, dan belum menyatukan pola pikir, Kurang maksimal dalam keputusan bersama walaupun sudah ada keputusan bersama yaitu dengan pihak swasta, Kurangnya anggaran dana untuk melakukan pengembangan desa wisata. Tanggung jawab dari pihak

sudah ada yaitu pihak pemerintah kabupaten berupa bantuan pencaangan *Pilot Project*, dan bantuan dana akan tetapi hasil observasi dana yang kurang untuk menambah fasilitas publik, sejauh ini tanggung jawab sudah sedikit terlihat berupa POKDARWIS dan masyarakat yang bersinergi membantu pemerintah desa.

Kata Kunci: Pengembangan Desa, Kolaborasi Aktor.

ABSTRACT

COLLABORATION BETWEEN ACTORS IN TOURISM DEVELOPMENT, TOURISM VILLAGE PILOT PROJECT (HARAPAN JAYA VILLAGE, WAY RATAI KEC, PESAWARAN REGENCY)

By

Rahmat Septiawan

The development of a tourist village must know the characteristics of the advantages and disadvantages of the village so that it can match the attraction being sold, the purpose of the establishment of a tourist village is to make the village independent and show potential in the village with the aim that government program efforts run optimally with the implementation of village development activities. tourism and promote good economic activities for the local community. One of the strategies launched by the government in the development of regional tourism is through the use of the Panthelix model collaboration. The Panthelix model was introduced and stated in the Minister of Tourism Regulation (Permen) of the Republic of Indonesia Number 14 of 2016 concerning Guidelines for Sustainable Tourism Destinations, That in creating orchestrations and ensuring the quality of activities, facilities, services and to create experiences and values of tourism benefits in order to provide benefits and benefits to the community. society and the environment, it is necessary to encourage the tourism system through the role of 1). Business, 2). Government, 3). Community, 4). Academics, 5). Media. (BGCAM) by Fosler (2002). According to Morse and Stephens (2012:566), collaboration is a form of supporting and implementing governance that suppresses the naturalness of the agreement process from various social actors (stakeholders) which are not only from the government, but involve the community and non-governmental institutions in collective action or cooperation. The purpose of this study was to determine collaborative efforts between actors in tourism development to realize the pilot project of Tourism Village, Harapan Jaya, Way Ratai District, Pesawaran Regency. The results of this study are that there are still several things to note, namely: Less than optimal in a dependency of the actors involved, the need for empowerment, especially the community and POKDARWIS because they are directly involved and have an effect on the tourism development of Harapan Jaya Village, Lack of awareness from the actors in the tourism sector, so that cooperation is not optimal, and has not united the mindset, Less than optimal in joint decisions even though there has been a joint decision, namely with the private sector, Lack of budget funds to develop tourist villages. The responsibility of the parties already exists, namely the district government in the form of assistance for the launching of the Pilot Project, and financial assistance, but the results of the observation are that there is insufficient funds to add public facilities, so far the responsibility has been slightly visible in the form of POKDARWIS and the community who work together to help the village government.

Keywords: Village Development, Actor Collaboration.

**KOLABORASI ANTAR AKTOR DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA, *PILOT PROJECT* DESA WISATA (DESA HARAPAN
JAYA, KEC WAY RATAI, KABUPATEN PESAWARAN)**

Oleh :

RAHMAT SEPTIAWAN

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **KOLABORASI ANTAR AKTOR DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA, PILOT
PROJECT DESA WISATA (DESA HARAPAN
JAYA, KEC WAY RATAI, KABUPATEN
PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : Rahmat Septiawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1746041010

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Nana Mulyana, S.IP., M.Si
NIP. 19710615 200501 1003

Vina Karmilasari, M.Si
NIP. 19910924 201903 2019

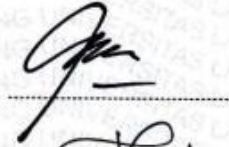
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meilyana, S.IP., M.A
NIP. 19740520 200112 2002

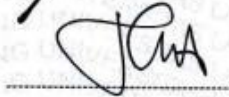
MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Nana Mulyana, S.IP., M.Si



Sekretaris : Vina Karmilasari, M.Si



Penguji :

Bukan Pembimbing : Dra. Dian Kagungan, M.H



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Agustus 2022

PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA

Saya adalah Rahmat Septiawan

NPM 1746041010

Dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri yang berdasarkan pada pengetahuan dan informasi yang telah saya dapatkan. Karya ilmiah ini tidak berisi material yang telah dipublikasikan sebelumnya atau dengan kata lain bukanlah dari plagiat karya orang lain.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, maka saya siap mempertanggungjawabkannya.

Bandar Lampung,
Pembuat Pernyataan

2022



Rahmat Septiawan
NPM. 1746041010



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 02 September 1999, sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Amran dan Ibu Suryani.

Pendidikan penulis dimulai dari SD Tanjung Raja Giham selesai pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) di SMP Negeri 2 Way Tuba dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) di SMA Negeri 1 Way Tuba dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Ujian Mandiri.

Pada tahun 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kedaton 1 Batang Hari nuban Lampung Timur. Pada bulan Agustus 2020 penulis melaksanakan Praktik Umum (PU). di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil' alamin puji syukur kehadiran tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” KOLABORASI ANTAR AKTOR DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, *PILOT PROJECT* DESA WISATA (DESA HARAPAN JAYA, KEC WAY RATAI, KABUPATEN PESAWARAN)”. Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan dan nasihat baik itu langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung telah memfasilitasi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Meiliyana, S.IP.,M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung telah memfasilitasi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Nana Mulyana,S.IP.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing satu skripsi, terimakasih atas kesempatan dan izin penelitian yang diberikan, saran, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan penelitian hingga penyelesaian skripsi.
4. Ibu Vina Karmilasari, M.Si ., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, motivasi nasihat dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H ., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran, bimbingan, dan evaluasinya terhadap karya skripsi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf administrasi di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Amran dan Ibu Suryani, kakak ku tersayang serta keluarga besarku yang telah banyak memberikan kasih sayang, dukungan moral, spiritual, material, motivasi, dan doa yang selalu menyertai penulis selama ini

8. Sahabat-sahabat perkuliahan terbaik Ilham Muhammad Rahman, Dea Rahma Wati, dan Ira Andriyani yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
9. Keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 terima kasih atas segala bantuan, semangat, dukungan, dan kebersamaannya selama ini.

Bandar Lampung, 2022

Rahmat Septiawan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Desa Wisata.....	11
2.2.1. Pengertian Desa Wisata.....	11
2.2.2. Kriteria Desa Wisata	12
2.2.3. Dampak Adanya Desa Wisata.....	12
2.3. Pengembangan Desa Wisata	13
2.3.1. Pengertian Pengembangan Desa Wisata.....	13
2.3.2. Prinsip Pengembangan Desa wisata.....	13
2.3.3. Tujuan Pengembangan Desa Wisata.....	13
2.3.4. Perencanaan Dalam Pengembangan Desa Wisata	14
2.4. Kolaborasi	16
2.4.1. Pengertian Kolaborasi	16
2.4.2. <i>Collaborative Governance</i>	17
2.4.3. Struktur Elemen — Elemen kolaborasi.....	18
2.4.4. Aktor Dalam Kolaborasi Pengembangan Desa Wisata	21
2.4.5. Tahap Tahap Dalam Pembentukan Kolaborasi.....	23
2.4.6. Pentingnya Kolaborasi	25
2.5 Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	28
3.2. Fokus Penelitian	28
3.3. Tipe Penelitian.....	29
3.4. Lokasi Penelitian	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6. Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Desa Harapan Jaya.....	34
4.1.2 Profil Perangkat Desa	36
4.1.3 Keuangan Desa.....	37
4.2 Hasil dan Penelitian	40
4.2.1 <i>Bussines</i>	41
4.2.2 <i>Government</i> (Pemerintah).....	42
4.2.3 <i>Community</i>	46

	x
4.2.4 Akademisi.....	52
4.2.5 Konsep Kolaborasi Model Pantahelix	54
4.3 Pembahasan	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Struktur Organisasi Pokdarwis Desa Harapan Jaya44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor Desa Harapan Jaya	32
Gambar 2. Kunjungan Bupati dan Dispar Kabupaten Pesawaran.	42
Gambar 3. Kunjungan Kadis Pariwisata Pesawaran di Bukit Cendana	42
Gambar 4. Rapat Dispar Pembahasan Scalling Up Desa Harapan Jaya	43
Gambar 5. Poto Bersama Ketua Pokdarwis	45
Gambar 6 . Gotong Royong Pokdarwis Pembuatan Peralatan Wisata	46
Gambar 7. Penanaman Bunga Di Lokasi wisata Bukit Cendana.....	46
Gambar 8. Pembuatan Peralatan Wisata	47
Gambar 9. Kegiatan Gotong Royong.....	47
Gambar 10. Kegiatan Bersih Bersih Di Jalur Wisata Deangan Kades	48
Gambar 11. Kunjungan mahasiswa Universitas Lampung Karya Wisata Ilmiah	50
Gambar 12. Kunjungan Mahasiswa Itera Pembuatan Faslitasi Wisata	50\
Gambar 13. Rapat musyawarah Mahasiswa Unila Pemerintah Desa dan Masyarakat desa.....	50
Gambar 14. Akun Facebook.....	52
Gambar 15. Akun Resmi Youtube Harapan Jaya.....	52
Gambar 16. Website Dinas Pariwisata Pesawaran	53
Gambar 17. Akun Resmi Pemerintah Desa.....	53
Gambar 18. Akun TikTok Desa Harapan Jaya.....	54
Gambar 19 Akun Instagram Bukit Cendana	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya peradaban tidak hanya membuat seseorang memerlukan kebutuhan primer dan sekunder, tetapi juga kebutuhan bersantai atau berlibur menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia modern. Yang kemudian membuat pariwisata sekarang ini dapat dilihat sebagai sebuah fenomena cukup penting dari sebuah gaya hidup yang menjadi motif dalam melakukan perjalanan wisata, sehingga dalam konteks ini kepariwisataan dapat dijadikan sebagai sebuah industri yang dibutuhkan oleh manusia. Peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan otonomi daerah setiap daerah dapat menggali potensi yang dapat dikembangkan, sehingga perkembangan masing-masing daerah meningkat dengan pesat.

Terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah sektor pertanian, sektor perternakan, perikanan, sektor tekstil dan busana, sektor otomotif, sektor elektronik, sektor pariwisata dan lain-lain. Peneliti disini lebih tertarik dari salah satu sektor tersebut yaitu sektor pariwisata, karena Kabupaten Pesawaran memiliki potensi sektor pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang daerah mengembangkan potensi daerah. Pengembangan pariwisata yang berorientasi pelestarian budaya, alam dan profit akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) karena pariwisata merupakan sektor yang potensial dan prospektif. Pariwisata adalah salah satu dari industri baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam pariwisata dan merangsang sektor-sektor informal seperti aneka makanan/kuliner khas,

cendera mata, kerajinan tangan, jasa pemandu wisata, transportasi, penginapan dan lain sebagainya.

Kreativitas kemudian menjadi modal utama dalam pengembangan industri kepariwisataan yang dimaksud untuk bisa menciptakan pasarnya sendiri dalam menumbuhkan produk-produk industri pariwisata yang berkualitas dan laku untuk dijual kepada wisatawan serta mampu mendorong investor untuk berinvestasi. Sektor pariwisata sangat dimungkinkan karena ketersediaan berbagai potensi pariwisata yang ada serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi. Menurut beberapa masyarakat Desa Harapan Jaya bahwa sifat pariwisata itu sendiri yaitu dinamis, dimana suatu saat akan muncul titik puncak kejenuhan atau kebosanan bagi wisatawan untuk menikmati kondisi yang sudah ada, dan itu sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan ke suatu objek wisata yang pastinya berdampak langsung pada pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Pesawaran mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang nantinya diharapkan mampu mendukung perkembangan daerah dengan usaha ekonomi daerah multisektor, serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahwa sektor ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Kabupaten Pesawaran khususnya di Desa Harapan Jaya.

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Nuryanti mengemukakan bahwa desa wisata merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan cara tradisi yang berlaku sehingga menjadi desa tersebut tujuan wisata (Yuliati & Suwandono, 2016). Tujuan dari pengembangan desa wisata untuk melestarikan lingkungan alam dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga dengan mengimplementasikan konsep desa wisata ini menjadi salah satu wujud pariwisata yang ramah terhadap lingkungan pada waktu mendatang (Juwita dalam Putra, 2013).

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses pengembangan desa wisata juga sebagai kegiatan pemberdayaan guna masyarakat dalam pembangunan desa

secara bersama-sama, dan motivasi desentralisasi memberikan kebebasan bagi warga untuk mengatur dan mengelola pariwisata di daerahnya merupakan metode untuk menciptakan pariwisata yang berbasis kelompok sosial masyarakat. Pengembangan desa wisata harus mengetahui karakteristik kelebihan dan kelemahan desa tersebut sehingga dapat sesuai dengan daya tarik yang dijual, tujuan dibentuknya desa wisata adalah agar menjadikan desa yang mandiri dan menunjukkan potensi di desa dengan tujuan agar upaya program pemerintah berjalan dengan maksimal dengan diimplementasikannya kegiatan pengembangan desa wisata dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang baik bagi masyarakat setempat.

Dalam mewujudkan upaya program pemerintah agar lebih dapat maksimal maka diperlukannya kolaborasi antar aktor. Kolaborasi merupakan istilah dari kerjasama antar pihak melibatkan proses kerja masing-masing antar dua pihak atau lebih, hal ini bertujuan agar keinginan yang akan dicapai dapat lebih mudah dikarenakan banyaknya pihak yang ada di dalam kegiatan tersebut. Dalam praktek administrasi publik kolaborasi merupakan strategi baru dalam pelaksanaan *government* untuk melaksanakan pengambilan dan implementasi kebijakan dengan mengedepankan konsensus dari *multiple stakeholder* yang mana terdiri dari pemerintah, serta masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah publik atau pengelolaan program publik. Menurut Morse dan Stephens (2012:566), kolaborasi merupakan wujud pendukung dan pelaksanaan *governance* yang menekan kealamian proses kesepakatan dari berbagai aktor sosial (*stakeholder*) yang mana tidak hanya dari pemerintah, akan tetapi melibatkan masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam tindakan kolektif atau kerjasama.

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki program pariwisata yang disebut “*One Villages One Destination*” yaitu upaya pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam mendorong agar desa di Kabupaten Pesawaran dapat membangun desatinasi wisata sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Pengembangan pariwisata melalui program *One Village One Destination (OVOD)* merupakan pendekatan pengembangan potensi desa untuk menghasilkan produk wisata yang mampu bersaing dengan pasar, dengan tetap memiliki keunikan karakteristik desa tersebut. Produk yang di hasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Dan program pemerintah yang baru adalah KEMILAU PESAWARAN merupakan Brand

Pariwisata Kabupaten Pesawaran dengan tujuan mengenalkan jargon baru KEMILAU PESAWARAN sebagai identitas baru Pariwisata Kabupaten Pesawaran. Akan tetapi program *One Village One Destination (OVOD)* tetap di jalankan dan tidak berubah dikarenakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan 50 desa OVOD dari 144 desa di Kabupaten Pesawaran. Dalam setiap pengembangan tentu adanya kegiatan pengelolaan Pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pesawaran No 35 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran Tahun (2017).

Salah satu desa yang terus menggerakkan potensi di desanya yaitu Desa Harapan Jaya yang mana desa tersebut adalah desa swadaya yang memiliki banyak potensi wisata, dan dengan di latar belakang oleh program dari bupati dengan mencanangkan kegiatan wisata desa *Pilot Project* desa Harapan Jaya, Kepala Desa yang bernama Susalit Cokro Aminoto terus melakukan pergerakan pembangunan desa wisata, desa Harapan Jaya memiliki banyak potensi wisata alam yang ada, di mana potensi wisata itu ditujukan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut, potensi pariwisata desa yang ada di Desa Harapan Jaya antara lain, : Air Terjun Sinar Tiga, Bukit Cendana, Bukit Lantana, Air Terjun Tirta, semua destinasi yang ada tersebut di bawah naungan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Desa ini memiliki luas 17,37 kilometer kebanyakan penduduk berkerja sebagai petani dan ibu rumah tangga, desa tersebut memiliki 9 dusun antara lain : Dusun Sinar Tiga, Dusun Sinar Dua Atas, Dusun Sinar Dua Bawah, Cengkung, Sinar Puncak, Mekar Sari, Sinar Ogan, Sinar Harapan dan Sinar Satu.

Dusun Sinar Tiga menjadi dusun dengan lokasi paling tinggi di desa, dusun ini berada di ketinggian 748 mdpl, banyaknya lereng yang curam di dusun ini di suatu sisi memberikan keindahan perkampungan, sehingga hal ini menjadikan terbentuknya wisata desa. Potensi alam yang mendukung dan potensi sosial yang mendukung melatarbelakangi Desa Harapan Jaya menjadi desa wisata yang ada di Kecamatan Way Ratai, kepala desa yang aktif mengajak masyarakat untuk bergotong royong ditambah masyarakatnya sendiri yang rutin bergotong royong, dengan ditambahnya pergerakan dan sumber daya yang memadai. Tentu hal ini menjadi modal utama dalam pengembangan desa wisata dari dukungan masyarakat sendiri sehingga dengan adanya sumber daya alam yang mendukung serta sumber daya manusia yang aktif dapat menjadi tolak ukur tersendiri dalam upaya pengembangan desa wisata, komunitas pokdarwis (kerlompok sadar

wisata) yang tumbuh berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi suatu sistem dari bagian ekologi yang berhubungan.

Setelah dicanangkannya Desa Harapan Jaya sebagai desa *pilot project* langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pihak penyelenggara dengan melakukan, yaitu:

1. Memerbaiki struktur organisasi, yang mana struktur ini bertujuan untuk menetapkan tugas serta tanggung jawab per seorangan.
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana berupa fasilitas publik.
3. Menyiapkan atraksi dan akomodasi.
4. Membentuk petugas keamanan yang mana tujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung.

Desa Wisata Harapan Jaya menjadi lebih eksis dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah desa yang aktif, mereka membentuk kolaborasi atau kerjasama dari berbagai pihak yaitu masyarakat umum, masyarakat yang mengelola, dan lembaga pokdarwis (kelompok sadar wisata). Kelompok sadar wisata atau disebut pokdarwis berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam upaya perwujudan program pemerintah dan pengembangan sadar wisata di daerahnya, pokdarwis dibentuk dan mendapatkan SK dari kepala desa. Tujuannya kolaborasi ini agar wisata yang ada di Desa Harapan Jaya dapat dikenal di luar Kecamatan Way Ratai, Dalam kolaborasi ini pihak terkait yaitu pemerintah, masyarakat desa, dan pokdarwis melakukan kegiatan yaitu kegiatan: (1). Rapat atau program kegiatan dari berbagai elemen masyarakat di antaranya, pemerintah desa serta perangkat desa, masyarakat dari semua dusun dan organisas pokdarwis yang bertujuan merancang rencana kegiatan kedepannya, (2). Gotong royong atau kegiatan bersih bersih di lokasi wisata membuat plang arah petunjuk desa wisata, (3). Menyiapkan sarana dan prasarana di mana bertujuan menciptakan kenyamanan bagi pengunjung, (4). Membuat akun sosial media yang bertujuan untuk mempermudah dalam kegiatan promosi, (5). Melakukan rapat kunjungan dari pemerintah daerah, (6). Melaksanakan *event* setiap bulan dan setiap hari libur.

Dengan adanya program tersebut kegiatan pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya terus digerakan, pemerintah Kabupaten Pesawaran memberikan perhatian bagi periwisata di Desa Harapan Jaya dengan mencanangkan sebagai desa *Pilot project* pada tanggal 30 Januari 2021. Sesuai dengan SK Bupati Nomor 556/154/IV.04/III/2020 yang sudah *louncing* akan tetapi dalam progres

perkembangannya masih belum maksimal dan pemerintah desa sudah menyurati masing-masing OPD tentang kebutuhan wisata desa, tujuannya yang mana program ini memberikan proyek percontohan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Pesawaran agar mengangkat potensi-potensi yang ada di desa-desa Kabupaten Pesawaran, namun dengan demikian masih ada saja beberapa hambatan dalam proses pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya antara lain, yaitu:

1. Transportasi yang belum memadai seperti jasa angkutan untuk mengantar wisatawan ketempat lokasi objek wisata,
2. Biaya dalam pengembangan kegiatan atraksi di lokasi wisata.
3. Dampak masa pandemi covid-19 kegiatan wisata di batasi hal ini berpengaruh bagi kegiatan pengembangan dan promosi melalui *event* yang mana bisa menarik wisatawan.

Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan dan pendapatan yang dihasilkan dari wisata desa tersebut, maka dari itu harus adanya kesadaran dalam bekerjasama yang harus dilakukan oleh berbagai aktor dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut agar kembali berjalan dengan semestinya, aktor yang berkontribusi dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat dan komunitas sadar wisata setempat.

Collaborative Governance (Jung et al., 2009) adalah sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalkan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. Dalam konteks ini, *Collaborative Governance* merupakan suatu model, di mana dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak dapat dengan mandiri mengelola daerahnya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik. Peran aktor yang terlibat, diantaranya terdiri dari peran pemerintah, swasta, masyarakat umum, akademisi dan juga media.

Peran dari pemerintah adalah sebagai pembuat regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan serta mengintegrasikan program-program daerah yang mana dalam konteks ini yaitu program *pilot project*. Integrasi program *pilot project* ini merupakan hal yang penting karena jika tidak ada keterkaitan maka program yang dijalankan tidak ada acuan dan dasarnya. Hal tersebut lebih jauh

lagi dapat menghambat proses pemantauan dalam pengembangan desa wisata yang ada di Desa Harapan Jaya. Peran dari masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam hal menyuarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas masyarakat yang mana program-program dari komunitas masyarakat tersebut dapat disinergikan dengan program pemerintah. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari program pemerintah.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat merealisasikan program-program yang dibuat oleh pemerintah. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka program dari pemerintah tidak dapat dijalankan secara optimal. Peran dari sektor swasta adalah membantu pemerintah untuk memberikan stimulus berupa inovasi-inovasi yang diciptakan oleh pihak swasta sehingga pemerintah dapat mengadopsi inovasi tersebut bahkan dapat bersama-sama merumuskan suatu inovasi dalam hal pembangunan. Sektor swasta juga memiliki andil untuk memberikan suntikan berupa hal-hal yang bersifat materi maupun non materi. Tentunya pihak pemerintah dapat terbantu dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta, baik dalam hal penyediaan modal maupun kerjasama berupa program-program pemerintah dengan sektor swasta yang dapat disinergikan seluruh sektor mendapatkan manfaat dari kerjasama yang dibangun.

Peran dari pihak media adalah bagaimana media dapat menjadi alat untuk mendukung pihak pemerintah dalam hal sosialisasi dan promosi sehingga eksistensi dari pemerintah dalam menjalankan programnya dapat tersosialisasi dengan baik sehingga informasi akan program yang telah dirumuskan pemerintah dapat secara optimal sampai kepada masyarakat sekitar. Peran media dalam pengembangan wisata yang berkontribusi pada Desa Harapan Jaya yaitu media Facebook, Tiktok dan media berita lainnya yang mana dari setiap kegiatan atau update terbaru tentang objek wisata di desa tersebut selalu dibagikan dihalaman pemberitahuan Facebook Tiktok. Dengan adanya media Facebook, Tiktok dan media lainnya masyarakat akan dimudahkan untuk mendapatkan informasi.

Salah satu aktor yang tidak kalah penting perannya dalam pembangunan adalah dari sektor akademisi. Akademisi merupakan aktor yang dibutuhkan dalam hal merumuskan suatu kebijakan dan program. Dengan dirumuskannya naskah akademik oleh akademisi yang berisi rekomendasi dan arahan kebijakan dan

program berdasar pada format dan sistem yang telah diatur, maka hal tersebut akan membantu pihak pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, bukan kebijakan yang tidak berdasar pada teori. Akademisi yang berkontribusi dalam upaya pengembangan wisata yang ada di Desa Harapan Jaya yaitu dari akademisi Universitas Lampung, kontribusi yang dilakukan baik itu dari mahasiswa maupun guru/dosen dari Universitas Lampung yaitu dengan memberikan arahan, pelatihan, dan pengawasan dalam upaya mewujudkan kebijakan yang diberikan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Selain itu, akademisi dari Universitas Lampung mengontrol, dan melakukan penelitian atau turun lapangan ke lokasi wisata dalam perkembangan dari kebijakan tersebut yang mana mereka memantau keberlangsungan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan dalam meneliti tentang **“Kolaborasi Antar Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata, *Pilot Project* Desa Wisata Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata untuk mewujudkan *pilot project* Desa Wisata, Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata untuk mewujudkan *pilot project* Desa Wisata, Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang di lakukan penulis dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang didapat dalam dunia perkuliahan, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan ilmu pengetahuan dalam Ilmu Administrasi Negara .

2. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan referensi serta dapat memberikan rekomendasi terhadap pemerintah dalam kolaborasi aktor pengembangan desa wisata, dan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terlibat.dalam kegiatan tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan dan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat mempermudah dalam menentukan teori atau konsep.

1. Dhana Febrian Safitri (2018), Penelitian yang berjudul “Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Komunitas Wisata Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember” Dari Hasil Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pantai payangan murni dikelola oleh masyarakat melalui kerjasama antar *Stakeholder* yang di antaranya adalah : Pemerintah Desa Sumber Rejo, Pokdarwis, dan Masyarakat yang ada di lokasi destinasi, Perbedaan peneliti di atas dengan peneliti sendiri adalah terletak pada judul inti yaitu, peneliti di atas berfokus pada pengelolaan sedangkan peneliti sendiri fokus pada kolaborasi pengembangan
2. Nova Ladiana (2019), Penelitian yang berjudul” Kolaborasi Pengembangan Destinasi Tempora, Desa Kali Anget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Dari Hasil Penelitian tersebut wisata Tempora melakukan 4 tahap teori kolaborasi yaitu *Assesment, Inititation, Delebration, Implementation*, dan tahap ini melakukan kerjasama dengan dan melakukan perjanjian antara Perhutani dan Dinas Pariwisata yang dijadikan sebagai unsur pelaksanaan kolaborasi. Perbedaan Penelitian di atas dengan peneliti sendiri terletak pada teori, teori yang dipakai oleh peneliti ada 4 tahap yaitu *Assesment, Inititation, Delebration, Implementation*, dan penelitian di atas hanya berkerjasama dengan pihak Perhutani dan Dinas Pariwisata saja, sedangkan peneliti sendiri melakukan teori Kolaborasi Model Pantahelix, yaitu pihak pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi, dan media.
3. Mayan Sri Harjanti dan Selamat Subekti (2017), Penelitian yang berjudul “Kolaborasi Perpustakaan Pesona Pustaka Dengan Pokdarwis Agro Binangkit Dalam Pengembangan *Community Based Tourism* Desa Pagilaran, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi perpustakaan Pesona Pustaka dengan Pokdarwis dalam pengembangan *Community Based Tourism* belum sepenuhnya berjalan dengan

baik karena perpustakaan Pesona Pustaka sebagai perpustakaan berbasis komunitas belum berperan dalam pembentukan komunitas, dan masyarakat lokal disimpulkan bahwa belum berpartisipasi secara aktif, sementara pemangku kepentingan cukup Akomodatif. Perbedaan Penelitian terletak penelitian diatas terletak pada fokus tempat yaitu kolaborasi pengembangan perpustakaan berbasis *Community Based Tourism* sedangkan Peneliti sendiri berfokus pada kolaborasi aktor pengembangan *Pilot Project*.

2.2. Desa Wisata

2.2.1 Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan pariwisata yang berbasis pariwisata desa yang mana memberikan suasana alam desa yang di mana dikelola oleh pihak, untuk dijadikan kegiatan pariwisata yang berbasis desa. Menurut Antara dan Arida (2015) Desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur yang unik secara keseluruhan, yang dapat menarik wisatawan.

Nuryanti dalam Sahwi (2016 : 10) mendefinisikan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antar atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang mana disajikan dalam struktur masyarakat yang mana menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku, dijelaskan bahwa komponen penting dalam desa wisata adalah :

1. Akomodasi, yaitu di mana sebagian penduduk setempat dan unit-unit, yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal suatu penduduk.
2. Atraksi, yaitu di mana kegiatan aktifitas kehidupan masyarakat setempat, beserta latar fisik lokasi desa yang mana memungkinkan berintegrasinya wisatawan memiliki peran aktif di desa wisata seperti kursus tari, dan hal-hal lainnya.
3. Fasilitas pendukung yaitu adalah sarana sarana yang mana memudahkan keanggotaan wisata, yaitu dengan adanya fasilitas seperti WC umum, tempat parkir dan lain-lain.

2.2.2 Kriteria Desa Wisata

Menurut Antara & Arida (2015) suatu desa harus memiliki kriteria tertentu sebagai berikut, yaitu:

1. Atraksi Wisata, yaitu di mana semua aspek yang mencakup alam, budaya, dan hasil ciptaan manusia, atraksi yang dipilih adalah yang mana paling menarik dan atraktif di desa.
2. Jarak Tempuh, yaitu jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal pada wisatawan, terutama jarak tempuh dari provinsi dan jarak tempuh ibu kota kabupaten.
3. Besaran Desa, yaitu di mana menyakut jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan wilayah desa, berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada sebuah desa.
4. Sistem Kepercayaan dan Kemasyarakatan, merupakan aspek penting mengingat keadaan aturan-aturan khusus pada komunitas sebuah desa, perlu dipertimbangkan pada mayoritas agama yang ada di suatu desa, sistem kemasyarakatan yang ada di desa.
5. Ketersediaan Infrastruktur, meliputi fasilitas pelayanan transportasi, fasilitas air, drainase, jaringan telpon dan lainnya.

2.2.3 Dampak Adanya Desa Wisata

Pariwisata yang ada di desa merupakan wujud proses pembangunan desa, dan suatu kegiatan yang berdampak positif terutama bagi desa dan masyarakatnya, adanya desa wisata maka tentu hal ini menjadi tolak ukur kemajuan di desa tersebut, dan upaya tersebut adalah upaya atau kebijakan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di desa tersebut, berikut ada dampak positif adanya Desa wisata, yaitu:

1. Semakin banyaknya kunjungan wisatawan, maka akan memberikan dampak positif, yaitu mendorong kemajuan ekonomi, serta akan menjadikan desa tersebut menjadi maju dengan adanya wisata yang ada di desa.
2. Membuka lapangan pekerjaan, dengan adanya desa wisata maka akan membuka lapangan pekerjaan, di mana masyarakat ikut serta menjadi petugas pengelola wisata.
3. Membuat usaha usaha kuliner dan usaha UMKM yang mana bisa di promosikan oleh masyarakat bila ada wisatawan yang berkunjung dan akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi bagi masyarakat desa.

2.3. Pengembangan Desa Wisata

2.3.1 Pengertian Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata, menjadi desa wisata membawa pada perubahan fisik pada keadaan desa, di mana pengembangan desa wisata tersebut akan menjadikan desa menjadi maju. Pengertian pengembangan desa wisata Menurut Pearce dalam (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013) menyatakan bahwa pengembangan desa wisata adalah sebagai suatu proses yang menekankan sproses cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata, secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata merupakan sebagai usaha - usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Pengembangan desa wisata merupakan wujud dalam menciptakan dan mengembangkan desa, dan suatu proses bagaimana desa dapat menjadikan desa berkembang dan maju, dalam sebuah pusat wisata yang mempunyai unsur kepuasan bagi wisatawan, pembangunan sektor pariwisata di desa dalam tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan melibatkan lapisan masyarakat dalam kegiatan pengembangannya.

2.3.2 Prinsip Pengembangan Desa wisata

Prinsip dalam pengembangan desa wisata gagasan yang memiliki landasan atau petunjuk arah yang mana menjadi pegangan dalam pengembangan desa wisata. Menurut (Sastrayuda, 2010), prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternaif yang mana dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip pengelolaan antara lain:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat.
2. Menguntungkan masyarakat setempat.
3. Berskala kecil untuk memudahkannya terjalin hubungan timbal balik dalam masyarakat setempat.
4. Melibatkan masyarakat setempat .
5. Dan menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

2.3.3 Tujuan Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata tentu tidak jauh dari banyak faktor tujuan, tujuan utama adalah mensejahterakan masyarakat dan menjadi desa maju. Namun

Menurut Sastrayuda (2010) tujuan pengembangan desa wisata adalah sebagai berikut :

1. Mengenali jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk setempat.
2. Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab, terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.
3. Mengupayakan agar masyarakat berperan aktif dalam membuat keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya, dan agar mereka mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
5. Mengembangkan produk wisata desa.

2.3.4 Perencanaan Dalam Pengembangan Desa Wisata

Perencanaan pariwisata adalah proses kompleks dengan cara mempertimbangkan beberapa aspek serta segmen dalam pariwisata desa. Perencanaan yang tepat mengenai sasaran: fisik, hukum, promosi, keuangan, pasar ekonomi, manajemen, sosial, dan aspek lingkungan akan dapat membantu dalam pengembangan pariwisata dengan cara yang menguntungkan, konsep perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli, pengertian atau perencanaan Menurut Wardiyanti (2011):

1. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan - kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, oleh karena itu hakekatnya terdapat pada semua manusia.
2. Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Perencanaan sebagai analisis kebijakan (*Planning as Policy Analysis*) yaitu merupakan tradisi yang di ilhami oleh logika - logika berpikir ilmu manajemen, administrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi yang di sebut sibernetika.

Dalam suatu masyarakat adanya perencanaan dalam pengembangan pariwisata akan memberikan kesempatan yang sangat luas, yang mana agar lebih memahami makna dari pengembangan pariwisata. Dengan tujuan agar masyarakat desa dapat mengerti bahwa pentingnya pengembangan pariwisata di

desa tersebut, berikut ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pengembangan pariwisata Menurut Wardiyanto (2010), yaitu:

- a) Memberikan Pengarahan, rencana pariwisata akan memberikan panduan pada pengembangan pariwisata untuk memahami arah perkembangan pariwisata yang akan dilaksanakan, rencana pariwisata juga dapat di gunakan oleh para pengembang untuk mengarahkan perkembangan pariwisata sesuai dengan tujuan yang digunakan.
- b) Membimbing Kerjasama, mengingat banyaknya masalah yang terjadi, pelaksanaan pembangunan pariwisata akan senantiasa melibatkan banyak pihak, pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait, karena itu dengan disusunnya rencana pengembangan yang baik sebagai pedoman bagi pihak terkait dalam melaksanakan kerjasama untuk mengembangkan pariwisata. Dengan kerjasama itu, masing-masing pihak dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya sehingga dapat optimal hasil yang dimilikinya.
- c) Menciptakan Koordinasi, rencana pariwisata yang telah dirumuskan dengan baik akan digunakan sebagai pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, yakni pemerintah masyarakat, dan organisasi terkait, untuk melaksanakan koordinasi guna untuk mensinergikan semua potensi yang dimilikinya, dengan sinergi dalam koordinasi diharapkan upaya pengembangan pariwisata dapat berlangsung lebih cepat dan lebih efektif.
- d) Menjamin Tercapainya Kemajuan, karena pada rencana pengembangan pariwisata telah memuat tahap-tahap pelaksanaan pengembangan pariwisata daerah, dengan catatan bahwa semua tahapan yang telah dirumuskan dalam rencana pariwisata dapat dilaksanakan secara maksimal dengan konsisten dan kondisinya sesuai dengan perkembangan situasi yang ada.
- e) Memperkecil Resiko Kegagalan, rencana pariwisata desa akan memperkecil resiko karena semua langkah yang dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata telah diperhitungkan dan dirumuskan sebelumnya, sehingga pengembangan tinggal melakukan pedomaan rencana pariwisata yang telah dirumuskan.
- f) Mendorong Pelaksanaan, rencana pelaksanaan dapat mendorong dalam

pengembangan pariwisata untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan segera dengan waktu yang telah ditentukan karena dalam sebuah rencana pariwisata telah dijelaskan tahap-tahap yang dilakukan. Dari pelaksanaan ada lima hal pokok yang perlu dilakukan dalam pembuatan perencanaan pariwisata yakni : konsultasi, komunikasi, kerjasama, koordinasi, dan komitmen.

Dalam pengembangan pariwisata dapat disimpulkan hal-hal yang harus dilakukan dalam pengembangan pariwisata desa antara lain yakni:

1. Koordinasi, koordinasi adalah sesuatu yang diartikan sebagai menggerakkan, menserasikan, dan menyeimbangkan situasi yang spesifik atau beda-beda agar semua terarah pada pencapaian tertentu, Menurut Handoko (2011) “ koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan - kegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan yang efisien. Tanpa koordinasi individu akan kehilangan pegangan dalam organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses dalam bentuk dalam memadukan berbagai kepentingan lembaga atau kelompok organisasi, dalam tujuan yang dicapai bersama-sama dalam rangka tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama- sama.

2. Kerjasama, kerjasama dalam pengembangan desa wisata adalah hal yang penting, karena setiap yang bersifat pengembangan pasti melibatkan banyak pihak terutama pemerintah desa. elemen masyarakat (organisasi terkait, dan masyarakat setempat). Tanpa adanya kerjasama maka dapat dipastikan mustahil pengembangan desa wisata dapat berjalan maksimal. Adanya kerjasama maka hal ini akan menjadi faktor yang akan menentukan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan desa wisata, jika kerjasama berhasil disinergikan maka akan berdampak pada peningkatan wisatawan dan akan mendongkrak perekonomian masyarakat desa.

2.4 Kolaborasi

2.4.1 Pengertian Kolaborasi

Pengertian kolaborasi adalah merupakan istilah dari kerjasama antara pihak yang mana antar pihak melibatkan proses kerja masing-masing antar dua pihak atau lebih, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kolaborasi juga bertujuan

agar keinginan yang akan dicapai dapat lebih mudah dikarenakan banyaknya pihak yang ada di dalam kegiatan tersebut. Namun secara umum kolaborasi dapat pula diartikan proses kerjasama antar individu-individu, atau antar organisasi yang mana bertujuan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi, dengan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam praktik administrasi publik, kolaborasi merupakan strategi baru dalam pelaksanaan *governance* untuk melaksanakan pengambilan dan implementasi kebijakan dengan mengedepankan konsensus dari *multiple stakeholder* yang mana terdiri dari pemerintah, serta masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah publik atau mengelola program publik.

Menurut Morse dan Stephens (2012: 566), berpendapat bahwa kolaborasi merupakan wujud pendukung dan pelaksanaan *governance* yang menekan kealamian proses kesepakatan dari berbagai aktor sosial (*stakeholder*) yang mana tidak hanya dari pemerintah, akan tetapi melibatkan masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam tindakan kolektif atau kerjasama.

Pada sektor sektor publik misalnya, kolaborasi dipahami sebagai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan dan tanggung jawab, antara beberapa entitas dan aktivitasnya yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan publik di mana pihak - pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat, pihak - pihak yang berkolaborasi bisa dari *government*, *civil society*, dan *private sector*. Tujuan utama dalam kolaborasi sektor publik diperuntukkan untuk pelayanan publik pada masyarakat.

Dari penjelasan pengertian kolaborasi di atas dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah suatu kegiatan wujud kerjasama antar individu- individu, atau organisasi - organisasi yang mana melibatkan lebih dari satu pihak, kolaborasi dilaksanakan dalam rangka untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan atau mengelola aset atau program publik.

2.4.2 Collaborative Governance

Sebelum membahas lebih dalam lagi terkait *collaborative governance*, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai *governance*. Pengertian *governance* dirasa perlu jelaskan karena istilah *governance* menjadi dasar dari konsep *collaborative governance*. Hal ini diupayakan agar dapat menemui pemaknaan yang lebih konkrit dan tidak terjadi kerancuan bagi peneliti maupun pembaca.

Dalam aspek studi mengenai Ilmu Administrasi Negara sering muncul istilah *government* dan *governance*, kedua istilah tersebut hampir serupa namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Selain itu, pada kajian *governance* juga memiliki pemaknaan yang berbeda dikalangan beberapa ahli.

Governance berasal dari kata “*govern*” yang berarti mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Dwiyanto, 2015). Dalam konsep *governance*, pemerintah atau *government* merupakan salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Menurut Chema dalam Keban (2008:38), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003).

Sementara Ulum dan Ngindana (2017) menyebutkan bahwa *governance* mengindikasikan disesiminasi otoritas dari *single actor* menjadi *multi actor*. Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam konsep *governance*, beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat. dengan adanya *governance* menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan-urusan publik.

2.4.3 Struktur Elemen Elemen kolaborasi

Praktik kolaborasi menggantikan pengelompokan hirarkis dengan pendekatan yang mana melakukan interaksi sesama anggota, hirarkis menekan kan model dengan satu arah, terdapat beberapa tokoh dominan, kolaborasi menekankan parktik dengan dua arah, akan tetapi tetap menekan kan salah satu tokoh untuk sebagai posisi utama. Model melingkar menekan kan kontinuitas, kondisi proses timbal balik antara anggota *stakeholder* dengan yang lain, yang mana tidak ada anggota *stakeholder* yang melakukan praktik kolaborasi dengan cara

mendominasi secara terus menerus. Adapun struktur elemen dalam kolaborasi sebagai berikut :

- A.** Tujuan kolaborasi, secara singkat tujuan terbentuknya kolaborasi adalah yaitu:
- Memecahkan masalah
 - Menciptakan sesuatu.
 - Menemukan sesuatu dalam sebuah hambatan.
- B.** Hambatan dalam kolaborasi, yaitu :
- Keahlian, yang kurang dalam memahami dan melakukan strategi.
 - Waktu, yang minim sehingga dalam melakukan strategi kolaborasi terbatas.
 - Biaya, dalam suatu proses kolaborasi tentu adanya dana atau biaya, yang mana biaya tersebut untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi biaya yang minim dapat menghambat terjadinya proses kolaborasi, terutama dalam pengembangan desa wisata, yang mana menggunakan dana yang tidak sedikit anggarannya.
 - Kompetisi, yaitu banyaknya pesaing sehingga kegiatan menjadi terhambat dan saling memperebutkan tujuannya.
- C.** Mengapa diperlukannya kolaborasi, ada empat hal yang di mana perlunya kolaborasi yaitu:
- Membangun pemahaman atau gagasan melalui sharing, informasi, antara berbagai pihak terkait, yaitu melakukan mekanisme sesuatu yang tidak ada kepastian.
 - Melakukan pembangunan mekanisme untuk mengambil keputusan yang efektif yaitu melalui fokus pada masalah bersama-sama, dengan membangun dukungan antar pihak terkait.
 - Membangun dan menghasilkan kegiatan kerja yang efektif dan melakukan koordinasi lintas batas, manajemen bersama - sama, dan kegiatan mobilisasi dalam memperluas gagasan atau ide.
 - Mengembangkan kemampuan antar pihak untuk menghadapi tantangan Bersama-sama di masa depan.

D. Prinsip - prinsip kolaborasi

- Transparan terhadap anggota organisasi atau lembaga, dan saling menghormati antar sesama pihak, dan saling mengambil saran dari pihak terakit.
- Pembagian peran yang bertanggung jawab dalam kegiatan.
- Hubungan kerja yang efektif, yang mana adanya kolaborasi dapat mempermudah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
- Membangun kearifan lokal.
- Menghormati perbedaan dan keberagaman.
- Kontinu dan adaptif.
- Sekala lebih luas, pemahaman lebih luas.

E. Faktor suksesnya kolaborasi

- Pandangan yang sama.
- Kesempatan baru berinteraksi.
- Kelembagaan yang sama dalam interaksi yang intens.
- Mengatasi masalah dengan cara - cara yang baru dan berbeda.
- Peka terhadap tanggung jawab dan komitmen.
- Kemitraan inti, individu-individu bukan lembaga lembaga.
- Energik, penuh akan pengabdian, proaktif, berani, dan inovatif.
- Mendapatkan dan menghargai bantuan dari pihak lain.

F. Indikator dalam kolaborasi,

Menurut Grenstein (2012) adalah: berkontribusi secara aktif, bekerja secara produktif, menunjukkan fleksibilitas, kompromi, menunjukkan tanggung jawab, menunjukkan sikap dalam menghargai, dan komunikasi antar pihak.

G. Tahap Tahap Pelaksanaan *collaborative governance* Oleh Morse dan Stephens (2012)

- Tahap pertama dalam proses kolaborasi adalah suatu kegiatan penilaian (*assesment*), pada tahap ini yaitu membahas tentang suatu kondisi di mana mempengaruhi apakah kolaborasi dan memungkinkan atau tidak, pada tahap ini disebut tahap penilaian. Di mana tahap ini akan menemukan bahwa kolaborasi apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, pada tahap ini ada beberapa kegiatan yaitu:

- Kegiatan yang mana memahami faktor - faktor kontekstual misalnya sejarah, kerjasama, dan intensif, ataupun kendala dari kerjasama.
 - Identifikasi *stakeholder*.
 - Kesepakatan umum mengenai masalah atau tujuan bersama yang akan dicapai.
 - Komitmen untuk mengejar solusi kolaboratif.
 - Identifikasi kunci yang mana yang termasuk konvener. Sponsor, serta identifikasi sumber daya.
- Tahap selanjutnya adalah tahap inisiasi, tahap ini mencakup kegiatan rapat atau diskusi *stakeholder*, yang mana tahap ini membangun kelompok kerja dan desain kerja, bedanya tahap penilaian adalah menekankan analisis kemampuan, pada tahap ini lebih mengutamakan *soft skill* yaitu melakukan penyelenggaraan kerjasama, membangun kerjasama, dan membentuk tim.
- Tahap selanjutnya adalah tahap proses musyawarah (*deliberation*), pada tahap ini yaitu kegiatan membangun aturan dasar, yang selanjutnya melakukan kegiatan musyawarah dan dialog antar pihak terkait, sebagai proses belajar bersama yang mana bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi sebuah pilihan, dan selanjutnya tahap ini akan mencapai kesepakatan kolaboratif.
- Tahap implementasi, adalah tahap yang mana terakhir dalam membangun kolaborasi, yang mana ada beberapa kegiatan yaitu:
- Merancang struktur *governance*.
 - Membangun dukungan konstituen.
 - Memantau, evaluasi hasil, dan kerjasama.

Pada tahap implementasi ini yang akan menentukan apakah dalam kegiatan kolaborasi dapat diteruskan atau tidak diteruskan, dalam proses yang dilaksanakan apakah mendapat suatu permasalahan.

2.4.4 Aktor Dalam Kolaborasi Pengembangan Desa Wisata

Dalam sebuah kolaborasi tentu hal nya pemegang wilayah (pemerintah desa) tidak mandiri mengelola wilayahnya untuk membangun wilayah nya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak dominan. Dibutuhkan peran dan pemangku

kepentingan yang lain, hal ini bertujuan agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mudah dilaksanakan, baik dari masalah ataupun akomodir kebutuhan publik. Peran aktor yang terlibat di antaranya adalah terdiri dari: 1). peran pemerintah desa, 2). organisasi sadar wisata, dan 3). masyarakat pengelola ataupun masyarakat umum.

Salah satu strategi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata daerah adalah melalui penggunaan kolaborasi model Panthelix. Model Panthelix diperkenalkan dan dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Deastinasi Pariwisata Berkelanjutan, Bahwa dalam menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukannya pendorong sistem kepariwisataan melalui peran 1). *Bussiness*, 2). *Government*, 3). *Community*, 4). *Academican*, 5). *Media*. (BGCAM) oleh Fosler (2002), lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Bussiness* (Dunia Usaha).

Berperan sebagai penyelenggara bisnis pariwisata sesuai dengan etika bisnis, profesional, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Peran dunia usaha sebagai pihak yang “*profit oriented*” juga harus bertanggung jawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai modal utama pariwisata.

2. *Government* (pemerintah).

Pemerintah berperan menyiapkan prasarana sarana dasar dalam mendukung pengembangan pariwisata, menyiapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pariwisata memfasilitasi kemudahan berwisata dan berusaha dalam melakukan kegiatan promosi dan pemasaran destinasi. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi adalah sebagai berikut: Regulator, Fasilitator, Mediator, dan Penyedia Prasarana. Dalam pengembangan destinasi wisata maupun pengembangan industri atau usaha pariwisata tentunya dilakukan oleh pihak-pihak lain dan pemerintah berfungsi sebagai memfasilitasi dan mendukungnya.

2. *Community* (Komunitas).

Community yang di maksud adalah masyarakat, dan komunitas-komunitas (NGO/LSM). Masyarakat berperan mendukung sapa pesona/darwis plus menyediakan jasa-jasa pariwisata ekonomi kreatif. Masyarakat dan komunitas NGO/LSM adalah objek dan subjek dari pariwisata itu sendiri, oleh karena itu masyarakat harus tau persis apa peran mereka dalam pariwisata. Pendampingan terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata di daerah.

3. *Academician* (Akademisi).

Akademisi berperan sebagai riset atau pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata, agar membangun pariwisata berbasis penelitian. Seringkali peran hasil penelitian tidak dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata. Berbagai pengabdian masyarakat dapat dilakukan akademisi dalam pengembangan pariwisata, untuk itu perlu adanya komunikasi dan kerjasama dengan akademisi dalam pengembangan pariwisata.

4. *Media*.

Media online saat ini menjadi kekuatan informasi andalan dalam promosi pariwisata, Promosi dan pemasaran pariwisata sekarang ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Promosi sekarang lebih bersifat *inklusif*, contoh: wisatawan dapat mengunggah testimony berkunjung ke suatu objek wisata dengan menggunakan media sosial.

2.4.5 Tahap Tahap Dalam Pembentukan Kolaborasi

Pembentukan kolaborasi baik kolaborasi antar personal ataupun antar organisasi, yang mana melibatkan banyak aktor yang mana dilakukan dengan persiapan yang tidak matang agar kolaborasi ini benar-benar bisa berjalan dengan efektif dan efisien, kolaborasi harus didirikan dengan dasar pondasi yang kokoh dan solid. Tanpa pondasi yang kuat maka kolaborasi yang akan dikerjakan tidak akan berjalan dengan maksimal atau bisa jadi berhenti di tengah jalan. Menurut pendapat Hill (2011), ada tujuan Langkah-langkah tahap yang harus dilakukan dalam mendirikan kolaborasi yang ideal yang kokoh, ketujuh langkah tersebut meliputi hal berikut:

- 1) Kolaborasi harus dikaitkan dengan kebutuhan nyata dari masing-masing anggota yang terlihat dalam kolaborasi (*connect to the real world*). Kolaborasi yang efektif harus selalu diawali dengan pemahaman dari semua

anggota terhadap situasi dan kondisi lingkungan, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar, yang ada di sekitar organisasi semua kolaborator harus memiliki pemahaman yang perinci yang lengkap bagaimana situasi pasar, masyarakat, dan komunitas serta aspek lain apa saja yang sedang berkembang agar keberadaan kolaborasi dapat menyikapi secara arif dan positif demi tercapainya kolaborasi secara optimal.

- 2) Memahami bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan (*understand how work gets down*) agar bisa mendapatkan kinerja kolaborasi secara tinggi, semua anggota kolaborasi harus memiliki pemahaman yang optimal tentang bagaimana sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan. Pada dasarnya, sebuah kolaborasi memiliki kapasitas kerja yang lebih efektif serta memiliki personel yang cocok untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan penyelesaian yang di hadapi.
- 3) Mendesain organisasi kolaborasi (*design a collaborative organization*) Maksud hal ini adalah adalah pembentukan lembaga atau organisasi kolaborasi yang efektif dan efisien sebab dengan kolaborasi. Kolaborasi juga sangat membutuhkan kemampuan pendiri atau pemimpin kolaborasi bagaimana proses kolaborasi itu harus di organisasikan dengan baik dan benar agar kolaborasi itu dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien.
- 4) Membantu pemimpin dalam mengelola kolaborasi (*help managers drive collaboration*). Pada umumnya dalam sebuah organisasi mereka sering menghadapi mereka sering mendapatkan kegusaran dalam kolaborasi dengan pihak lain. Hal tersebut akan bisa diperoleh ketika iya telah membangun kolaborasi dengan banyak pihak yang berkompeten dalam bidangnya berupa bantuan pemikiran tentang peran mereka agar ia memiliki kemampuan prima dalam mendukung, melatih, dan mengarahkan kolaborasi yang efektif.
- 5) Pemeberdayaan staff (*empower staf*) semua staff harus memiliki kemampuan yang baru, keahlian baru, talenta baru, pengalaman baru serta membutuhkan kesempatan baru untuk memperaktifkan dalam proses kolaborasi. Oleh sebab itu mereka harus diberdayakan atau dilatih secara terus menerus, oleh karena itu agar seluruh pihak yang diperbantukan dalam kolaborasi harus dilatih, di berikan dukungan dan selalu diarahkan agar mereka siap berkerja secara kolaboratif.

- 6) Selalu membenahi dukungan system (*align support system*). Dalam proses kolaborasi harus ditempuh dengan cara mendesain ulang tentang cara metode kerja yang mana disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. Oleh sebab itu mereka harus diberikan kesempatan untuk latihan berupa edukasi, *workshop*, agar mereka dapat mengikuti perkembangan zaman.
- 7) Membangun budaya kewirausahaan kolaborasi (*develop a culture of collaborative entrepreneurship*). Kolaborasi itu lebih banyak apa yang dirasakan dan cara bagaimana merespon perasaan tersebut agar menghasilkan perubahan terhadap kondisi yang lebih baik dan yang berujung pada tercapainya tujuan organisasi secara optimal berkaitan dengan hal tersebut langkah yang dapat dilakukan dengan cara membangun *corporate culture* yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik kebutuhan bisnis ataupun sektor publik.

2.4.6 Pentingnya Kolaborasi

Kolaborasi adalah sesuatu yang sangat di perlukan dalam sesuatu kegiatan baik dalam kegiatan swasta ataupun dalam kegiatan pemerintahan, dengan adanya kegiatan kolaborasi maka kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan lebih mudah di jalankan dengan sistem *team work* (kerjasama) yaitu dengan melakukan kemampuan individu untuk melakukan kerjasama.

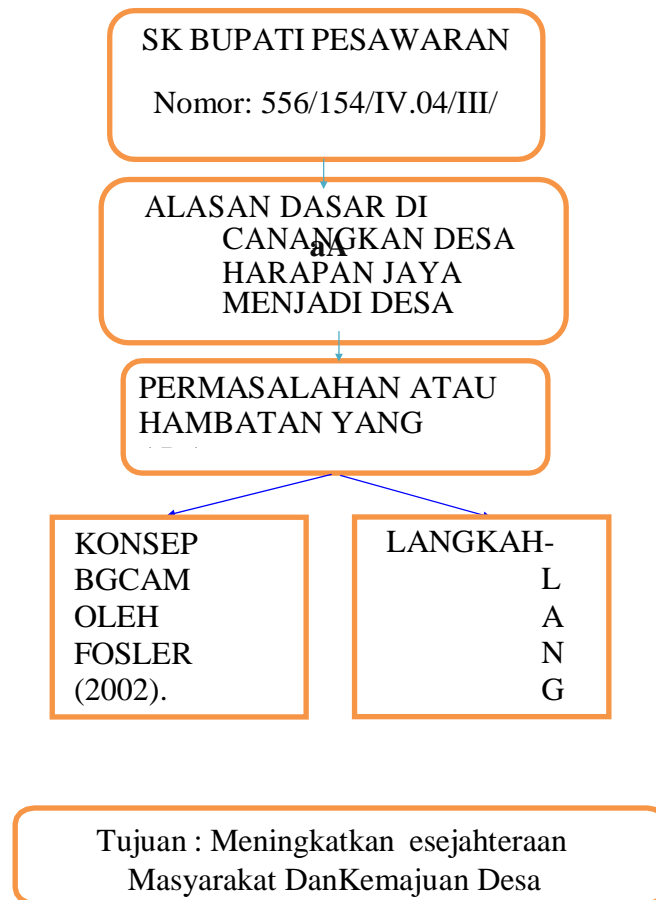
Lebih dari itu, pembentukan kolaborasi dapat digunakan untuk percepatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara Bersama-sama. Bahkan dalam proses pencapaian tujuan tersebut, tidak dianjurkan dalam melakukan pengotak-atikkan atas tugas yang diemban oleh masing-masing pihak terkait. Hal ini sebagaimana yang di katakan oleh Nawawi (1984) bahwa kolaborasi merupakan upaya sadar dalam mencapai tujuan bersama yang mereka tetapkan melalui pembagian tugas pekerjaan. Pembagian kerja tersebut bukanlah sebagai bentuk pengotak-atikan kerja, tetapi masih dinilai sebagai satu kesatuan kerja yang semua terarah pada pencapaian tujuan bersama.

Sementara pada sisi lain, pembentukan dengan adanya kolaborasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang besar, beban pendanaan yang besar, penyediaan aset kerja, ataupun untuk penanggulangan berbagai masalah yang berat dan rumit yang tidak mungkin dapat dikerjakan secara individu tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Valdellon (2017) mengatakan bahwa dalam pembentukan kolaborasi itu, baik dilakukan antar individual atau antar lembaga sangat penting karena kolaborasi memiliki sebelas (11) manfaat yang meliputi sebagai berikut:

- a) Kolaborasi dapat meningkatkan fleksibilitas organisasi (*improvet flexibility of the organisasi*).
- b) Kolaborasi dapat digunakan untuk saling mempertautkan para pekerja (*engaged employess*).
- c) Kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk memperlakukan karyawan atau pegawai secara sehat (*healthier employess*).
- d) Kolaborasi dapat digunakan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang produktif (*more productive meeting*).
- e) Kolaborasi semakin memperkuat terciptanya talenta yang tinggi (*more attractive to top talent*).
- f) Kolaborasi dapat digunakan dalam memacu terhadap kemajuan bisnis yang lebih cepat (*accelerated business velocity*).
- g) Kolaborasi dapat meningkatkan daya simpan atau daya ingat yang lebih tinggi (*higher retention rates*).
- h) Kolaborasi dapat menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif (*innovative ideals*).
- i) Kolaborasi dapat digunakan untuk menempatkan posisi *stakeholder* secara lebih tepat (*better alignment with stakeholder*).
- j) Kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja segenap individu yang terlibat (*enhanced individual productivity*).
- k) Kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan (*increased profilability*).

2.5 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yang menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada (Anggito, Albi, & Setiawan, 2018). Menurut Erickson (Anggito et al., 2018) penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka memahami tentang kolaborasi Desa Wisata Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu susunan permasalahan yang ada dan yang akan dikembangkan dan akan dibahas yang mana dikaji secara mendalam. Fokus penelitian ini adalah bertujuan untuk melakukan analisis kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata *pilot project* Desa Wisata Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, yang mana apakah kegiatan kolaborasi tersebut berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak, Dalam penelitian ini maka peneliti berfokus pada rumusan masalah yang mana ingin mengetahui bagaimana upaya kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata *pilot project* Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan fokus yang dikemukakan di atas, maka kiranya di utuhkan suatu alat untuk mengukur kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata *pilot project* Desa Wisata Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Di bawah ini peneliti mengemukakan mengenai konsep kolaborasi

yang menjadi titik acuan penelitian untuk mengetahui kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata *pilot project* Desa Wisata Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan teori menurut Fosler (2002) yaitu :

1. *Bussiness* (Swasta) yaitu pihak perusahaan swasta yaitu PT Masari Multi Fruti.
2. *Government* (Pemerintah) Pemerintah Desa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
3. *Community* (Community) Komunitas Pokdarwis dan Masyarakat Pengelola.
4. *Academician* (Academisi) pihak kampus yaitu pihak Universitas Lampung.
5. *Media* (Media). Yaitu media sosial berupa Facebook, instagram, dan Tiktok.

3.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan detail mengenai objek yang akan diteliti dan berusaha memandang fenomena yang terjadi di lokasi yang akan diteliti.

3.4. Lokasi Penelitian

Menurut (Moleong, 2016), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam menentukan sebuah lokasi penelitian cara efektif yang harus ditempuh dalam menentukan lokasi penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan fokus serta rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang akan peneliti laksanakan adalah di lokasi Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Alasan peneliti memutuskan memilih lokasi tersebut karena Desa tersebut sudah menjadi desa wisata *pilot project* dan sudah masuk dalam kategori desa *One Village One Destination* (OVOD).

Definisi data sendiri merupakan suatu catatan dari berbagai kumpulan fakta yang ada, dapat berbentuk kata atau angka maupun yang lainnya (Moleong, 2016). Jenis-jenis data yang digunakan antara lain adalah:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data yaitu peneliti dari objek penelitiannya, Untuk mendapatkannya peneliti menggunakan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- 1) Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan hendak diteliti.

Berikut tabel tinjauan dari observasi penelitian :

1. Tabel Sumber Data Primer (Tempat lokasi penelitian)

No	Tempat atau Lokasi Penelitian	Gejala
1.	Pemerintah Desa Harapan Jaya	Sebagai pihak peran utama dalam pihak pengembangan. desa wisata.
2.	Pokdarwis	Berpartisipasi sebagai penggerak sadar wisata di desanya
3.	Akademisi	Sebagai pihak yang melakukan pengabdian masyarakat berupa penelitian dan memberikan ide pokok dalam strategi pengembangan desa wisata
4.	Dinas Pariwisata Pesawaran	Sebagai kontribusi pembina dan memberikan pemanfaatan dana untuk melakukan pengembangan desa wisata
5.	Bussines	Sebagai pihak yang memberikan fasilitas lahan dan mengelola lahan untuk tempat lokasi wisata.
6	Media	Sebagai pihak yang melakukan pemasaran produk dimedia sosial.

Sumber : Diolah oleh peneliti (2022)

- 2) Wawancara, Menurut Moleong (2016), Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Hasil yang diharapkan dengan dari wawancara dengan para informan adalah mendapatkan data yang akurat yang mana berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan atau narasumber, adapun informan atau narasumber yang diwawancarai adalah pemerintah desa Harapan Jaya, Kelompok Sadar Wisata, dan masyarakat desa Harapan Jaya, serta Pihak Terkait lainnya.

Tabel 2 Sumber Data Primer (Informan yang berkaitan dengan penelitian)

No	Tempat Lokasi Penelitian	Narasumber / Informan
1.	Pemerintah Desa Harapan Jaya	Susalit Cokro aminoto (Kepala Desa Harapan Jaya)
2.	Dinas Pariwisata Pesawaran	Aris Apriyadi (Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Pesawaran)
3.	Akademisi	Dra.Dian Kagungan M.H. (Dosen Fisip Unila Adm Negara)
4.	Pokdarwis	Rifki Pranata (Katua Komunitas Pokdarwis)
5	Media	Ghozali dan Susalit Cokro Aminoti (Kades Harapan Jaya)

Sumber : Di kelola oleh peneliti (2022)

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung yang diberikan berupa dokumen, arsip, dan catatan yang diberikan oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Adapun data sekunder data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, yaitu catatan catatan atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik dokumentasi para pelaku yangt berkaitan dengan kolaborasi dalam pengembangan desa wisata.

Berikut data sekunder yang peneliti dapatkan dilokasi penelirian

Tabel 3 Data Sekunder Surat Keputusan.

No	Data Sekunder
1.	SK Penetapan Pilot Project Desa Wisata Harapan Jaya
2.	Nota Kesepahaman Kerjasama Pihak Swasta PT. Masari Multi Fruti
3	SK Dinas Pariwisata Penetapan Desa Prioritas Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran

Di kelola oleh peneliti (2022)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu:

- a. Menurut Esterberg (Sugiyono, 2017), Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitain yang berupa pertanyaan- pertanyaan sebagai pedoman wawancara dalam melakukan wawancara dengan informan.
- b. Observasi, adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.
- c. Dokumentasi, adalah suatu data yang berupa foto, tulisan atau berkas, gambar, dan sebagainya.

3.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan sampai akhir dan berinteraksi dengan latar dan orang dalam rangka pengumpulan data. Menurut (Sugiyono, 2017) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a) Reduksi Data, adalah dimaknai sebagai proses memilah dan memilih hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, menyederhanakan data-data yang terkait dengan kepentingan peneliti saja. Dengan demikian hal ini akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- b) Penyajian Data,** Dalam penelitian kualitatif penyajian data berbentuk berupa uraian singkat, bagan, hubungan kasual antar kategori, dan sejenisnya. Miles and Huberman (Sugiyono, 2017) Menyatakan, yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah berupa teks yang berupa naratif.
- c) Menarik Kesimpulan,** Berdasarkan pola atau kegiatan yang telah dilakukan melalui gambaran dalam penyajian data, Gambaran untuk berupa fenomena yang telah diteliti, Kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dari masalah atau fenomena tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diatas tentang Kolaborasi Antar Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata *Pilot Project* Desa Wisata Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa peran aktor terlibat memiliki peran masing masing yaitu :

1. *Business*, yaitu pihak swasta PT Masari Multi Fruti yang berperan sebagai pihak yang menyiapkan fasilitas berupa lahan dengan kerjasama melalui MOU dengan pihak pemerintah desa dengan kesepakatan kerjasama selama 10 tahun, berupa lahan kosong yang dimanfaatkan untuk fasilitas tempat wisata yaitu Bukit Cendana, akan tetapi ada beberapa kawasan desa wisata berupa air terjun sinar tiga, air terjun tirta, dan bukit lantana berkerjasama dengan pihak Masyarakat, dan pihak dari Dinas Kehutanan dikarenakan lahan dari tiga tempat wisata tersebut milik Masyarakat dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang bertujuan agar dikelola dengan baik untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat Desa Harapan Jaya.
2. *Government*, Yaitu pihak pemerintah desa yang berperan sebagai aktor utama dalam pembentukan kerjasama atau kolaborasi, yang memiliki peran yaitu sebagai pihak yang mengawasi, dan menyediakan sarana dan prasarana.
3. *Community*, yaitu pihak POKDARWIS yang berperan sebagai penggerak sadar wisata ke masyarakat dan membantu pemerintah desa dalam urusan wisata.
4. *Akademisi*, yaitu memiliki peran sebagai pihak yang ,membantu pemerintah melalui penelitian atau juga kunjungan wisata ilmiah dan memberi sedikit ilmu yang atau gagasan ide kreatif yang menambah ilmu dalam pengembangan. Akademisis antara lain adalah Dosen, dan Mahasiswa.
5. *Media*, media sebagai alat untuk membantu pemerintah mempermudah komunikasi tentang pariwisata Desa Harapan Jaya, dan membantu dalam kegiatan promosi di sosial media, agar mencakup lebih luas target pasar.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu :

1. Kurang optimal dalam sebuah ketergantungan aktor yang terlibat perlu

adanya pemberdayaan terutama masyarakat dan POKDARWIS dikarenakan mereka terlibat secara langsung dan berpengaruh bagi perkembangan pariwisata Desa Harapan Jaya.

2. Kurangnya kesadaran dari pihak aktor dalam bidang pariwisata, sehingga belum optimalnya kerjasama, dan belum menyatukan pola pikir,
3. Kurang maksimal dalam keputusan bersama walaupun sudah ada keputusan bersama yaitu dengan pihak swasta.
4. Kurangnya anggaran dana untuk melakukan pengembangan desa wisata.
5. Tanggung jawab dari pihak sudah ada yaitu pihak pemerintah kabupaten berupa bantuan pencaangan *Pilot Project*, dan bantuan dana akan tetapi hasil observasi dana yang kurang untuk menambah fasilitas publik, sejauh ini tanggung jawab sudah sedikit terlihat berupa POKDARWIS dan masyarakat yang bersinergi membantu pemerintah desa.

5.2. Saran

Ada beberapa saran dari peneliti yang dapat peneliti sarankan kepada pemerintah desa dan aktor terkait dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya yaitu :

1. Pihak pemerintah harus melakukan pemberdayaan kepada POKDARWIS dan Masyarakat guna memiliki kemampuan dasar dalam upaya membantu pemerintah desa dalam upaya pengembangan, karena hasil penelitian yang peneliti temukan belum adanya pelatihan atau pemberdayaan dalam ilmu pariwisata.
2. Pemerintah Kabupaten seharusnya lebih membantu pemerintah desa berupa anggaran dana bantuan untuk pengembangan, karena hasil penelitian yang peneliti temukan kurangnya dana anggaran dalam pengembangan.
3. Perlunya koordinasi antar aktor secara khusus dalam upaya kolaborasi pengembangan, untuk melakukan rapat kunjungan setiap bulan atau setiap minggu, guna terjalinnya hubungan kolaborasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. sukabumi: CV Jejak.
- Antara, M., & Arida, S. (2015). *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*. Bali: Universitas Udayana.
- Dewi, M. H., Fandeli, C., & Baiquni, d. M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih. *Kawistara*, 3(131).
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gray, B. (1989). *Collaborating: finding Common Ground for Multiparty Problems*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Greenstein, L. (2012). *Assessing 21st Century Skills: A Guide to Evaluating Mastery and Authentic Learning*. California: Corwin.
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Harjianti, M. S., & Subekti, S. (2017). *Kolaborasi Perpustakaan Pesona Pustaka Dengan Pokdarwis Dalam Pengembangan Community Based Tourism, Desa Wisata Pagilaran, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang*. Universitas Ponorogo.
- Ladiana, N. (2019). *Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tempora, Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo*. Universitas Jember.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Pesawaran. (2017). *Peraturan Bupati Pesawaran No 35 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan Kawasan*.
- Permen Pariwisata RI. (2016). *Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Deastinasi Pariwisata Berkelanjutan*.
- Putra, T. R. (2013). *Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa*

- Wisata Tembi, Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantul. *Jurnal Pengembangan Wilayah Dan Kota*, 9(3).
- Safitri, D. F. (2018). *Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Komunitas Wisata Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan Di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ambulu*. Universitas Jember, Jember.
- Sastrayuda, G. (2010). *Concept Resosrt And Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata*.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka otonomi daerah, upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- SK Bupati Pesawaran. (2021). SK Bupati Pesawaran pilot project desa wisata harapan jaya, No 556/154/IV.04/III/2021.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press.
- Undang Undang RI. (2014). Undang Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang Undang No 23 Tahun 2014 Peraturan otonomi daerah.
- Wardiyanto. (2010). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: Lubuk Agung.
- Yuliati, E., & Suwandono, D. (2016). Arahana Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Nongkosawit Sebagai Destinasi Wisata Kota Semarang. Arahana Konsep Dan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Nongkosawit Sebagai Destinasi Wisata Kota Semarang, 2(4).